

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN DAN
PEMBERDAYAAN LEMBAGA KOMUNIKASI SOSIAL
(Studi Pada Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Di Kabupaten Pangandaran
Jawa Barat)**

**DEVELOPMENT POLICY IMPLEMENTATION AND
DEVELOPMENT INSTITUTE OF SOCIAL COMMUNICATION
(Studies in Public Information Group (KIM) In Pangandaran Regency of West
Java)**

Mulyono Yalia

Balai Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika (BPPKI) Bandung
Jalan Pajajaran No. 88 Bandung, Indonesia

(Diterima: 16 Februari 2015 ; Direvisi: 30 Maret 2015; Disetujui terbit: 2 April 2015)

Abstrak

Fokus utama dalam penelitian ini adalah implementasi kebijakan pengembangan dan pemberdayaan lembaga komunikasi sosial (KIM) di kabupaten Pangandaran Jawa Barat. Pembatasan masalah diidentifikasi sebagai berikut: (1) Bagaimanakah implementasi kebijakan pemerintah dalam pemberdayaan media komunikasi sosial di Kabupaten Pangandaran Jawa Barat; (2) Faktor-faktor apakah yang menjadi pendukung dan penghambat implementasi kebijakan pemerintah dalam pemberdayaan lembaga komunikasi sosial (KIM) di Kabupaten Pangandaran Jawa Barat; (3) Upaya-upaya apakah yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi/Kabupaten/Kota dalam mewujudkan kebijakan pemerintah dalam pemberdayaan lembaga komunikasi sosial di masyarakat. Teori yang dipakai sebagai pendekatan terhadap masalah penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan dari Jones (1984:296) yang terdiri dari dimensi Organisasi, Interpretasi dan Aplikasi. Metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi partisipan dan wawancara mendalam. Berdasarkan hasil penelitian melalui observasi partisipan dan wawancara mendalam serta triangulasi data, dapat dikemukakan bahwa di dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah mengenai pengembangan dan pemberdayaan lembaga komunikasi sosial di Kabupaten Pangandaran Jawa Barat melalui pendekatan faktor-faktor implementasi kebijakan ditemukan dimensi lain, yaitu pentingnya pengawasan dan koordinasi selain faktor-faktor implementasi kebijakan yang dijadikan sebagai pendekatan di dalam penelitian ini.

Kata kunci : Implementasi Kebijakan, Pemberdayaan.

Abstract

The main focus of this research is the development of policy implementation and empowerment of institutions of social communication (KIM) in the district of West Java Pangandaran. Restrictions issues identified as follows: (1) How is the implementation of government policy in the empowerment of social communication media in Pangandaran Regency of West Java; (2) What factors are supporting and inhibiting the implementation of government policy in the empowerment of institutions of social communication (KIM) in the district of Pangandaran, West Java; (3) Measures are implemented by the Office of Communications and Information Provincial / District / City in realizing the government's policy in the empowerment of social communication in public institutions. The theory used as an approach to the problem of this research is the theory of policy implementation of Jones (1984: 296) which consists of the dimensions of the Organization, Interpretation and Application. The research method used in this study is a qualitative method of data collection techniques through participant observation and in-depth interviews. Based on the results of research through participant observation and in-depth interviews and triangulation of data, it can be argued that in the implementation of government policy on the development and empowerment of institutions of social communication in the district of West Java Pangandaran through approach of policy implementation factors found another dimension, namely the importance of supervision and coordination in addition to factors that serve as the policy implementation approach in this study.

Keywords : Policy Implentation, Empowerment.

PENDAHULUAN

Kondisi geografis Indonesia yang tersebar dalam berbagai pulau, menyebabkan kendala kesenjangan informasi dikalangan masyarakat terpencil maupun di perbatasan, sementara kebutuhan akan informasi merupakan hak seluruh masyarakat tanpa kecuali, termasuk masyarakat di pedesaan. Pada sisi lainnya kondisi eksisting menunjukkan sebagian masyarakat belum memiliki kemampuan memadai untuk menelaah muatan informasi, baik karena faktor sosial (edukatif), ekonomis maupun kultural selain adanya keterbatasan akses dan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan informasi (blank spot area).

Peran pemerintah di bidang informasi dan komunikasi dalam era Reformasi, Otonomi dan Desentralisasi semakin terbatas, sehingga menimbulkan kegamangan dalam diseminasi informasi; sementara masyarakat masih membutuhkannya, terutama didaerah terpencil, perbatasan dan kawasan pedesaan. Untuk mengatasi hambatan informasi di masyarakat pemerintah telah mengeluarkan kebijakan berupa Permen Kominfo No. 17 Tahun 2009 tentang Diseminasi Informasi Nasional Oleh Pemerintahan, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terkait dengan pengembangan dan pemberdayaan komunikasi. Selanjutnya sebagai implementasi dari kebijakan tersebut telah dikeluarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 08/Per/M.Kominfo/6/2010 Tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial.

Dalam ketentuan umum Pasal 1 ayat 1 dinyatakan bahwa lembaga Komunikasi

sosial adalah Lembaga Komunikasi Perdesaan, Lembaga Media Tradisional, Lembaga pemantau Media dan lembaga Komunikasi Organisasi Profesi. Selanjutnya pada pasal 2 dijelaskan bahwa lembaga Komunikasi Perdesaan adalah Kelompok Informasi Masyarakat atau kelompok sejenis lainnya, selanjutnya disingkat (KIM) yang dibentuk oleh masyarakat, dari masyarakat dan untuk masyarakat secara mandiri dan kreatif yang aktivitasnya melakukan kegiatan pengelolaan informasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan nilai tambah. Tujuan KIM antara lain untuk memenuhi kebutuhan informasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, meningkatkan kesejahteraan dan kecerdasan, meningkatkan kemakmuran, kesejahteraan dan keadilan masyarakat dan meningkatkan kualitas SDM dalam mendukung keberhasilan pembangunan. Keberadaan kelompok ini diharapkan mampu menjadi jejaring penyampaian informasi mulai dari pusat kota sampai ke pelosok pedesaan.

Seiring dengan arus informasi yang makin mendera dewasa ini, keberadaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) merupakan upaya pemberdayaan masyarakat dengan mengembangkan paradigma komunikasi dengan masyarakat (communication with the people) bukan lagi komunikasi untuk masyarakat (communication for the people). Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial diarahkan untuk:

1. Mewujudkan jejaring diseminasi informasi nasional;
2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam demokrasi dan pembangunan serta sebagai upaya meningkatkan nilai tambah;

3. Mendorong peningkatan kualitas media massa dan kecerdasan publik dalam mengonsumsi informasi; dan

4. Membangun masyarakat informasi

Kabupaten Pangandaran merupakan salah satu kabupaten baru hasil pemekaran dari Kabupaten Ciamis di Jawa Barat yang telah melaksanakan kebijakan pengembangan dan pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial. Di Kabupaten Pangandaran kelompok informasi sosial masyarakat telah terbentuk sebanyak 2 Kelompok Informasi Masyarakat, tersebar di 10 Kecamatan dan 93 Desa, dengan bidang aktifitas meliputi Kelompok Pemandu Informasi Wisata, dan Kelompok Home Industri Gula Merah.

Sehubungan dengan itu, penulis tertarik untuk meneliti fenomena dimaksud secara lebih mendalam yang hasilnya disusun dalam bentuk laporan penelitian dengan judul: "Implementasi Kebijakan Pengembangan Dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial (KIM) Di Pangandaran Jawa Barat".

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang sudah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Pengembangan Dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial (KIM) di Jawa Barat.
2. Faktor-faktor apa yang menjadi pendukung dan penghambat implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Pengembangan Dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial (KIM) di Jawa Barat.
3. Upaya-upaya apa yang dilaksanakan oleh Dinas Kominfo Propinsi/Kab/Kota dalam

Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial (KIM).

Ruang Lingkup dan Pembatasan Masalah

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah kebijakan Pemerintah tentang Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial (KIM). Pembatasan masalah diarahkan pada implementasi kebijakan Pemerintah tentang Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial (KIM), faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi serta upaya yang dilaksanakan oleh Dinas Kominfo Propinsi/Kab/Kota dalam Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial (KIM).

Tujuan Penelitian

Untuk memperoleh pemahaman mendalam dari implementasi kebijakan Pemerintah Tentang Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial (KIM) berdasarkan Permen Kominfo Nomor 08/Per/M.Kominfo/6/2010 tentang Pedoman Pengembangan Dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial. Untuk memperoleh konsep yang dapat digunakan bagi pengembangan media Tradisional yang ada di masyarakat.

Objek Penelitian

Objek Penelitian ini adalah; Pertama; kebijakan Menkominfo tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi sosial. Kedua, target groupnya adalah masyarakat, kelompok organisasi atau pemerintah yang menyebarkan informasi kebijakan publik didaerahnya. Ketiga, Implementator kebijakan yakni aparatur Dinas Kominfo dan dinas lainnya di Jawa Barat

LANDASAN TEORI

Salah satu pendekatan studi implementasi kebijakan adalah dengan pendekatan *implementation approach*. Empat faktor yang menunjang dalam implementasi kebijakan publik adalah sumber, kecenderungan, komunikasi dan tingkah laku birokrasi. Keempat unsur atau faktor ini satu sama lain saling menunjang dan berinteraksi satu sama lainnya. Proses implementasi kebijakan lebih penting dari seluruh kegiatan proses kebijakan (Wahab 1990,45).

Kebijakan pemerintah dalam hal ini Kemkominfo pada bidang pemberdayaan lembaga komunikasi sosial didasarkan pada pemahaman akan pemanfaatan sumberdaya manusia serta kontribusi bagi pemberdayaan perekonomian masyarakat. Salah satu pendorong pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat adanya kebijakan dari pemerintah melalui permen kominfo nomor 08/Per/M/Kominfo/6/2010 tentang pedoman pengembangan dan pemberdayaan lembaga komunikasi sosial.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan jenis studi kasus. Nazir (1999;22) menyatakan bahwa metode deskriptif merupakan suatu meto penelitian yang bertujuan untuk: "Membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki".

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang memusatkan kepada fakta dan menggunakan analisis perbandingan. Untuk melakukan generalisasi empiris terhadap

fenomena-fenomena sosial. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang mendasar (*verstehen*) terhadap masalah-masalah sosial secara holistik dan impresif dengan menggabungkan analisis dan interpretasi data yang ditampilkan secara naratif. Hal ini sejalan dengan pendapat Creswell (2002) yang menyatakan bahwa pendekatan kualitatif: "Merupakan sebuah proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial atau masalah manusia berdasarkan pada penciptaan gambaran holistik lengkap yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci dan disusun dalam sebuah latar alamiah".

Bogdan dan Biklen (1992;29) menyatakan bahwa pendekatan kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati sehingga diperoleh suatu pemahaman dan penjelasan tentang terjadinya suatu proses. Metode kualitatif digunakan karena penelitian ini mengutamakan kualitas analisa dan bukan data-data yang bersifat statistik. Oleh karena itu penjelasan tidak berupa angka melainkan berupa kata-kata dan dokumentasi.

Penelitian kualitatif dilakukan untuk menemukan gambaran yang menyeluruh dan mendalam tentang objek yang diteliti, dengan berangkat dari suatu fenomena yang ada, penelitian ini juga tidak berangkat dari suatu teori yang hendak diuji kebenarannya, seperti dikatakan Alwasilah (2003;97) bahwa: "Penelitian kualitatif tidak berangkat dari teori, tapi berangkat dari kasus atau pengamatan". Senada dengan Alwasilah, Sugiyono (2005;1) mengatakan: "Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data

tidak dipandu oleh teori tetapi dipandu oleh fakta-fakta yang ditemukan pada saat penelitian di lapangan“.

Penelitian kualitatif sendiri dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan atau proses menjangkau informasi dari kondisi sewajarnya dalam kehidupan suatu objek seperti dikatakan Sugiyono (2005;1) bahwa; “Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk penelitian pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci...“. Nasution sebagaimana dikutip Sugiyono (2005;1) mengatakan bahwa “Penelitian kualitatif pada hakekatnya ialah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya“.

Surachmad (2004;140) mengatakan bahwa: “Penelitian kualitatif bersifat induktif, karena tidak dimulai dari hipotesis sebagai generalisasi untuk diuji kebenarannya melalui pengumpulan data yang bersifat khusus”. Menurut Surachmad dalam penelitian kualitatif objek yang diteliti dari satu unit atau kesatuan unit dipandang sebagai kasus. Kasus dapat terbatas pada satu orang, satu lembaga, satu keluarga, satu peristiwa dari satu wilayah, ataupun satu kelompok manusia dan kelompok objek-objek lain yang cukup terbatas dipandang sebagai satu kesatuan.

Melalui metode kualitatif maka data yang didapat lebih lengkap, lebih mendalam, kredibel dan bermakna sehingga tujuan penelitian dapat dicapai. Maka akan dapat diperoleh data yang lebih tuntas dan pasti, sehingga memiliki kredibilitas yang tinggi tentang implementasi kebijakan Menkominfo tentang Pedoman Pengembangan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi

Sosial berdasarkan Permen Kominfo No. 08/Per/M.Kominfo/6/2010.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Kebijakan Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial di Pangandaran Jawa Barat

Peran media kelompok komunikasi sosial dalam penyebaran informasi sudah terbukti dapat membawa masyarakat untuk bisa memahami setiap informasi yang disampaikannya, melalui Kelompok Informasi Sosial, terutama bagi masyarakat perdesaan, yang digunakan sebagai alat silaturahmi dan pengembangan usaha bersama

Media komunikasi informasi yang dimaksud dalam penelitian adalah Kelompok Informasi Masyarakat yang mampu memberikan informasi atau yang mampu menyampaikan penyebaran informasi pembangunan dari pemerintah maupun sebagai basis usaha peningkatan ekonomi kelompok, sehingga fungsi media ini dapat berperan sebagai sarana diseminasi informasi, pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial. Ini sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 08/Per/M.Kominfo/6/2010 tentang Pedoman Pengembangan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial.

Selanjutnya penulis akan membahas Implementasi Kebijakan Pemerintah mengenai Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial di Kabupaten Pangandaran Jawa Barat dengan pendekatan pada konsep Organisasi, Interpretasi, Aplikasi menurut Jones.

2. Implementasi Kebijakan.

a. Organisasi Pelaksana Kebijakan.

Daya dukung organisasi menyangkut tentang seberapa mungkin program dilaksanakan sesuai kebijakan yang ada dan berdasarkan fakta-fakta yang ada, dukungan organisasi dalam pembentukan KIM ini dapat dilaksanakan, dan bertindak sebagai pelaksana kebijakan organisasi. Seperti dikatakan oleh Udai Pareek, “Komunikasi keorganisasian dapat didefinisikan sebagai proses aliran (pengiriman dan penerimaan) pesan-pesan yang berorientasikan tujuan diantara sumber-sumber komunikasi, dalam suatu pola dan melalui suatu medium atau media”. (1996:97).

Hasil penelitian dan wawancara dengan responden dilapangan menunjukkan bahwa, berkenaan dengan bagaimana kebijakan pada organisasi mereka sudah memiliki kemampuan untuk mengakses setiap informasi, ketersediaan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan, sikap dan tanggap dari para pelaku yang terlibat, dan bagaimana struktur organisasi pelaksana kebijakan. Organisasi dibutuhkan oleh setiap pelaksana kebijakan untuk mengetahui apa yang harus dilakukan. Bagi suatu organisasi, komunikasi merupakan suatu proses penyampaian informasi, ide-ide diantara para anggota organisasi secara timbal balik dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Chester I Bernard dalam Yayat Hayati (2008:17) Organisasi informal mempunyai tiga fungsi dalam organisasi formal yaitu:

1. Sebagai saluran komunikasi, yaitu bahwa organisasi informal dapat

mempercepat komunikasi dalam organisasi formal.

2. Mempertahankan keakraban, kerukunan, dan kerja sama yang ada dalam organisasi formal sedemikian rupa sehingga keinginan-keinginan dan kesediaan-kesediaan individu yang bersangkutan sejalan dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan organisasi yang telah digariskan.
3. Mempertahankan harga diri, rasa kebebasan dan rasa persatuan dari anggota-anggota organisasi. Dalam keadaan lain, organisasi informal ini juga dapat menghancurkan organisasi formal.

Organisasi KIM ini berupaya untuk mempertahankan kesinambungan kehidupan masyarakat melalui kegiatan pendidikan, budaya dan kegiatan lain yang bersifat ekspresif dan bersifat profit oriented.

Faktor organisasi dianggap penting, karena dalam proses kegiatan yang melibatkan unsur manusia dan unsur sumber daya akan selalu berurusan dengan permasalahan bagaimana hubungan yang dilakukan.

1. Rata-rata anggota KIM, baik KIM Pemandu Wisata maupun KIM Pengelola Gula Kelapa Cantigi sudah memiliki kemampuan dalam mengakses media, karena rata-rata mereka adalah lulusan SMA dan bahkan ada mahasiswa, khususnya KIM Pemandu wisata, sedangkan KIM pengelola gula rata-rata sudah cukup tua tapi rata-rata lulusan SMA sehingga secara tidak langsung mereka telah mampu dalam mengakses media, baik secara formal/pendidikan maupun informal/otodidak. Dari hasil wawancara dengan dua KIM ini yang lebih menojol dalam mengakses media

maupun dalam menyerap informasi lebih menonjol kelompok KIM Pemandu Wisata, karena masih muda dan energik, sedangkan untuk KIM Cantigi, mereka kurang menonjol dalam penguasaan media karena mereka rata-rata sudah usia diatas 35 tahun, secara penguasaan TIK masih cukup jauh, tapi rata-rata juga mampu dalam mengakses informasi, terutama dalam melihat harga pasaran gula serta pembenihan pohon kelapa baru. Sedangkan KIM Pemandu wisata sudah mampu dari mulai menggali potensi, memasarkan mengadministrasi.

2. Dalam pembagian Wewenang kedua KIM tersebut sudah berjalan dengan baik berpedoman pada struktur organisasi yang sudah ada. Dalam pelaksanaan kedua KIM tersebut juga telah melakukan pendelegasian wewenang kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan organisasi KIM, mengingat keterbatasan kemampuan dan waktu yang ada pada pimpinan, pendelegasian merupakan azas yang harus dilaksanakan dalam setiap organisasi untuk menjaga kelancaran jalannya organisasi tersebut.
3. Kedua KIM yang ada di Pangandaran ini sudah menerapkan perintah kerja disetiap Unit yang dikelolanya, karena masing-masing unit sudah terikat oleh struktur organisasi KIM.

b. Interpretasi.

Belum berjalan dengan baik mengingat Kabupaten Pangandaran masih sangat baru, begitu pula keberadaan KIM yang baru dibentuk, belum sepenuhnya menginterpretasikan seluruh kebijakan baik dari daerah maupun pusat, mengingat

segi pembinaan dari Dinas sendiri belum optimal.

Keberadaan SDM dalam pengelolaan bidang usaha di KIM sudah bisa dikatakan mandiri karena sudah bisa menghidupi kelompok sendiri, walaupun dalam penguasaan IT masih rendah.

c. Aplikasi

Pedoman umum operasional kebijakan belum terlaksana karena baru dibentuk dan sudah dibina oleh Kabid Kominfo DishubkominfoPU dan Persampahan. Belum Secara rutin dilaksanakan mengingat usia Pemkab Pangandaran sendiri masih sangat muda, keberadaan bidang kominfo sebagai pembina masih belum terpisah dari induknya /DishubkominfoPU dan Persampahan, sehingga pembinaan belum maksimal, tetapi diupayakan untuk bisa melaksanakan pedoman operasional tersebut sehingga masing masing unit dapat melaksanakan tujuannya.

3. Application (Penerapan Kebijakan)

- Sarana dan prasarana untuk menunjang kelengkapan administrasi belum memadai mengingat KIM pemandu wisata baru dibentuk setahun yang lalu untuk kantor masih menggunakan rumah dan untuk operasional lapangan diberi sepetak tanah oleh Perhutani ukuran 2x3 untuk tempat berkumpul di lokasi wisata Pananjung Pangandara, bahkan kantor Pemdanya saja belum punya gedung sendiri. Demikian pula KIM Cantigi sarana untuk berkumpul telah memiliki tempat, sehingga untuk mendapatkan informasi dan diseminasi informasi dapat dilakukan di tempat ini.
- Belum menjadi prioritas mengingat sebagai kabupaten baru dan baru berusia 1,5 tahun, sistem administrasi/birokrasi belum berjalan

sebagai mana suatu pemerintahan yang baik, bahkan sarana dan prasarana pemda kabupaten sendiri belum memadai.

- Dalam menunjang pelaksanaan kegiatan lembaga komunikasi sosial dilaksanakan secara swadaya, hasil dari jasa memandu, maupun persewaan peralatan *snorcle* dan jasa paket *outbond* setiap minggunya, tetapi semenjak di bentuk KIM dicoba untuk menata sistem anggaran. Sedangkan KIM Cantigi dalam menunjang pelaksanaan bergerak dalam bidang usaha pengumpulan gula merah dari para anggotanya dan memasarkan langsung ke daerah lainnya, sedangkan bidang usaha lainnya adalah mengembangkan pembibitan pohon kelapa yang akan disadap airnya dijadikan bahan untuk gula.
- Reward and punishman di kedua KIM ini tetap ada dalam pengelolaan organisasi dengan tujuan agar anggota lebih disiplin dan mampu bersaing dalam upaya memajukan kelompoknya
- komunikasi yang intensif terus dilakukan hampir setiap hari mengingat pelaksanaan operasional kegiatan berjalan bersama setiap hari.
- SDM sudah memadai, mengingat mereka telah terlatih secara otodidak, tapi semenjak dibentuk KIM ini mereka lebih terorganisir dan saling *support* di dalam setiap unitnya, kekurangan yang belum terpenuhi sampai saat ini adalah sumber daya teknik informasi yang belum memadai, karena masih menggunakan perangkat TI yang sudah tua, serta masih memerlukan pembinaan dalam pengembangan Sistem Informasi Managemen untuk meningkatkan kapasitas SDM yang ada.

- Fasilitas yang tersedia seperti komputer belum memadai, tetapi fasilitas operasional sudah terpenuhi, hanya tinggal *me-manage* SDM yang ada, sehingga mereka tertib administrasi dalam organisasi.
- Sarana dan prasarana belum menjadi prioritas mengingat keterbatasan dana bagi pengembangan organisasi, bantuan dari pemda sendiri masih sebatas penunjukan, pembinaan secara khusus belum ada, maka hal ini akan berpengaruh terhadap kelangsungan organisasi

Kebijakan-kebijakan berjalan dengan tujuan yang berlawanan sehingga terjadi keretakan dan batas-batas organisasi. Dengan Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Nomor 08/Per/M.Kominfo/6/2010 tentang Pedoman Pengembangan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial sudah saatnya pihak Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika di daerah merubah pandangan serta tugas dan struktur yang ada di dalam Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo/Dishubkominfo) itu sendiri, hal ini akan ditunjang dengan bagaimana hasil akhir dari sebuah kebijakan, apakah akan meningkatkan Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial di Jawa Barat, atau bahkan malah menurun. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Diskominfo/Dishubkominfo sudah menjadi tolak ukur untuk meningkatkan peran media komunikasi sosial di Jawa Barat.

Aktivitas KIM

Dukungan birokrasi dalam program aktivitas KIM ini

- Mekanisme, aktivitas untuk mengakses informasi melalui survey lapangan di

tempat serta tukar menukar informasi dengan pengelola obyek wisata pantai daerah lainnya seperti Bali, Lombok, Jogja, serta bertukar pikiran dengan para ahli kepariwisataan, maupun para tamu, terutama dalam memberikan pelayanan yang prima.

- Hasil temuan dilapangan maupun setelah mengakses informasi kemudian di diskusikan dalam kelompok dan diambil kebijakan melalui rapat anggota. Pertemuan rutin setiap hari setelah selesai bertugas untuk melakukan evaluasi sekaligus, dan jika ada hal-hal yang dianggap urgen maka diambil keputusan melalui rapat khusus.
- Mekanisme KIM dalam menerapkan atau mendayagunakan pengetahuan atau informasi yang diperoleh, yaitu dengan memanfaatkan teknologi informasi walaupun dengan perangkat yang seadanya.
- Mekanisme hubungan antar anggota setiap KIM secara teratur dalam rangka tukar menukar informasi dilakukan secara *face to face*, sehingga ada saling dukung dalam operasional pelaksanaan tugas.
- Mekanisme Diseminasi Informasi yang dilakukan oleh KIM melalui *booklet*, iklan di situs internet, *leaflet* juga penggunaan sarana IT lainnya.
- Mekanisme penjangkaran aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh KIM, masyarakat langsung menyampaikan ke anggota KIM selanjutnya setiap informasi direspon langsung oleh anggota KIM.

Faktor-faktor yang menunjang dan menghambat Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial di Pangandaran Jawa Barat

- Penghambat: biaya/anggaran, SDM dan sarana IT
- Organisasi, dukungan penuh dari instansi pemerintah dalam hal ini dari Dishubkominfo PU dan persampahan, sedangkan hambatan yang dirasakan adalah minimnya fasilitas, karena masih menggunakan fasilitas pribadi yang sudah kurang memadai.
- SOP, sudah berjalan dengan baik, sedangkan hambatan kemampuan teknik individu dalam penguasaan kewilayahan selalu menyalahi SOP.
- SDM, untuk meningkan peran KIM dalam memberikan pelayanan diterapkan disiplin berperilaku, baik dari mulai pakaian seragam/sepatu, ID Card, sehingga bisa dipertanggung jawabkan apabila ada komplain dari pihak pengguna.
- Hambatan lainnya, kemampuan di bidang pemanfaatan TIK anggota belum menyeluruh, penggunaan bahasa asing anggota KIM belum sepenuhnya menguasai.
- Struktur organisasi berjalan dengan baik, karena masing-masing sudah memahami tugasnya sendiri-sendiri.
- Peningkatan mengakses informasi dilakukan melalui pemanfaatan media IT/internet maupun pertukaran informasi melalui saling kunjungan ke kelompok pemandu di tempat-tempat wisata pantai seperti Jogja, Bali, Lombok dan tempat-tempat lainnya dengan menggunakan anggaran sendiri.
- Peningkatan diskusi, tukar menukar informasi dan memecahkan masalah, diskusi selalu dilaksanakan setiap hari di sela-sela istirahat, maupun dalam acara *briefing*, selama ini tidak ada hambatan dalam melaksanakan tatap muka dengan anggota.

- Tahapan awal penerapan kebijakan telah dilaksanakan, yaitu dengan memanfaatkan *blogs*, sekaligus memperkenalkan keberadaan kelompok untuk diketahui oleh umum bahwa di pangandaran ada kelompok KIM yang memiliki usaha dalam bidang pemanduan wisata serta penyediaan peralatan bagi pengunjung, selanjutnya, kebijakan awal ini dibagi menjadi beberapa kelompok unit usaha karena anggota cukup banyak, dan memiliki kemampuan yang berbeda-beda maka di bentuk beberapa unit usaha lainnya.
- Peningkatan *Networking* yang merupakan hubungan antar KIM berjalan dengan baik, selalu melakukan kordinasi dengan antar anggota guna memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh lembaga/kelompok.
- Peningkatan diseminasi informasi secara khusus ke masyarakat lokal belum ada karena dari organisasi masih fokus untuk meningkatkan diseminasi internal dulu dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan anggota dalam melaksanakan diseminasi informasi nantinya.
- Peningkatan dan penyerapan aspirasi masyarakat, selalu ditingkatkan frekuensinya agar penyerapan selalu dilaksanakan dan diakomodir, karena informasi dari masyarakat sangat dibutuhkan sebagai evaluasi dan masukan bagi pengembangan KIM selanjutnya.

Upaya-upaya apa yang dilaksanakan oleh Diskominfo Kabupaten Pangandaran dalam pengembangan dan Pemberdayaan lembaga Komunikasi Sosial (KIM). Belum ada upaya yang rutin dalam pemberdayaan KIM, karena anggaran belum ada, serta baru dibentuk sehingga

perhatian dari Pemda belum begitu signifikan dalam pemberian perhatian terhadap KIM.

- Organisasi pelaksana sudah ada, dan baru dibentuk sebagai KIM, sehingga masih membutuhkan pembinaan dan perhatian dari pemerintah daerah. Nama kelompok asal adalah Paguyuban Pemandu Wisata Pangandaran.
- Sudah dijelaskan di depan tadi
- SDM belum memenuhi karena masih banyak yang belum menguasai tata kelola informasi, bahkan hampir semua anggotanya,
- Dalam pengelolaan lembaga KIM ini struktur organisasi sudah terbentuk dan sudah jalan
- Akses informasi dari berbagai sumber sudah berjalan lancar, cuma dalam pengelolaan atau tata kelola informasi anggota belum bisa melaksanakan secara penuh.
- Diskusi, maupun tukar menukar informasi dan juga dalam memecahkan masalah sudah berjalan, terutama apabila ada informasi baru, cuma dalam pengelolaan informasi belum maksimal dimanfaatkan.
- Dengan memanfaatkan sarana TIK sebesar besarnya diharapkan mampu memberikan penghasilan yang maksimal bagi lembaga KIM sendiri.!
- Untuk meningkatkan *Networking* yang merupakan hubungan antar KIM, belum dijalankan dengan baik dengan dinas terkait, yaitu dengan DihubkominfoPU mengingat usianya yang masih muda/baru sehingga koordinasi dalam pemanfaatan *networking* belum berjalan dengan baik.

- Untuk meningkatkan Diseminasi Informasi dirasakan belum berjalan dengan baik, karena masih tumpang tindih selama masih digabung antar dinas, sehingga fungsi diseminasi informasi akan terhambat.
- Untuk kelancaran program diseminasi informasi serta menyerap aspirasi dari masyarakat maupun anggota, maka diharapkan ada suatu lembaga terpisah yang menangani bidang informasi dan komunikasi dikalangan komunitas/KIM sehingga program pemerintah bidang kominfo dapat beerjalan dengan baik.

Dalam pelaksanaan kebijakan mengenai Pengembangan Pemberdayaan Lembaga Sosial Media Tradisional, Diskominfo Provinsi, Diskominfo/Dishubkominfo Kota dan Kabupaten di Jawa Barat terdapat faktor penunjang maupun penghambat.

Faktor penunjang diantaranya adalah:

- a. Adanya Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika yang mendukung dan memanfaatkan keberadaan media tradisional dan lembaga sosial masyarakat lainnya;
- b. Banyaknya seni media kelompok sosial yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana diseminasi informasi dari pemerintah ke masyarakat maupun pelestarian nilai-nilai kearifan lokal;
- c. Adanya *event-event* seperti Pekan Informasi Nasional yang diselenggarakan setiap tahun oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui Direktorat Kelembagaan Komunikasi Sosial.

Adapun faktor penghambatnya diantaranya:

- a. Kurangnya dukungan dana pelaksanaan kebijakan;

- b. Tidak optimalnya perhatian dari pemerintah lokal (setempat) seperti pemanfaatan Kelompok Komunikasi Sosial sebagai sarana diseminasi transformasi informasi kebijakan;
- c. Rendahnya minat masyarakat bergabung dengan kelompok komunikasi sosial yang ada didaerahnya.
- d. Kurangnya dukungan *stakeholders*.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan analisis hasil penelitian yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, selanjutnya peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

- a. Faktor Implementasi Organisasi, dan Interpretasi, sebagai pendekatan implementasi kebijakan pemerintah daerah belum terwujud secara ideal sehingga Pengembangan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial di Pangandaran Jawa Barat belum optimal dan berdasarkan hasil triangulasi data diperoleh makna bahwa terdapat dimensi lain yang turut memberikan arah bagi Pengembangan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial di Pangandaran Jawa Barat, yaitu dimensi pengawasan dan koordinasi serta penguatan aturan hukum.
- b. Faktor penunjang pelaksanaan kebijakan Pengembangan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial ditemukan berupa bentuk kebijakan yang bersifat umum seperti Peraturan Daerah atau bentuk peraturan lainnya yang ada pada tingkat lokal serta dukungan sarana dan prasarana termasuk ketersediaan anggaran operasional yang ditetapkan

melalui APBD. Di sisi lain secara eksternal perhatian DPRD terhadap upaya Pengembangan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial sangat rendah.

Upaya-upaya yang dilakukan Diskominfo Provinsi maupun Diskominfo / Dishubkominfo Kabupaten / Kota dalam Pengembangan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial di antaranya melalui sosialisasi kebijakan-kebijakan pemerintah Nomor 08/Per/M.Kominfo/6/2010 tentang Pengembangan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial di Jawa Barat.

Saran

- a. Pengawasan atau kontrol terhadap keberadaan KIM sebaiknya dilakukan lebih intensif mengingat informasi yang dibutuhkan oleh kelompok sangat bervariasi sehingga Dinas yang bersangkutan sebagai pembina bisa memberikan arahan yang dibutuhkan oleh kelompok.
- b. Faktor penunjang pelaksanaan kebijakan pengembangan hendaknya ditunjang oleh kebijakan Perda yang menguatkan posisi lembaga KIM ini, dengan demikian dukungan dari pemerintah daerah semakin kuat dan terjalin adanya kemitraan dengan dinas lainnya.
- c. Sosialisasi kebijakan pemerintah ini diharapkan lebih intensif lagi dilakukan oleh Dishubkominfo PU, bahkan sebaiknya untuk menangani keberadaan KIM ini dibentuk Dinas tersendiri seperti Diskominfo, sehingga tidak tumpang tindih.

DAFTAR PUSTAKA

Agustiono, Leo. *Politik dan Kebijakan Publik*. Bandung: UNPAD, AIPI dan Puslit KP2W, 2006.

Alwasilah, Chaedar. *Pokoknya Kualitatif, Dasar-Dasar Merancang Dan Melakukan Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Jaya, 2003.

Anderson, James E. *Public Policy Making*. New York: Holt Rinehart and Winston, 1978.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Prenada Media Group, 2007.

Cresswell, John W. *Research Design Qualitative And Quantitative Approches, Thousand Oaks*. Sage Publication, 2002.

Dunn, N. William. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Edisi kedua*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press., 2003.

Dwidjowijoto, Riant Nugroho. *Kebijakan Publik Untuk Negara-negara Berkembang*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo., 2006.

Edward III, George C. *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Press., 1980.

Faisal, Sanafiah. *Metode Penelitian Kualitatif, Dasar-Dasar Dan Aplikasi*. Malang: YA3, 1999.

Irfan, Islamy. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.

Pareek, Udai. *Perilaku Organisasi, Seri Manajemen no 98. LPPM*. Jakarta: PT. Pustaka Binaman Presindo, 1996.

- "Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 08/PER/M.KOMINFOO/6/2010 Tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial. ." n.d.
- "Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 17 Tahun 2009 tentang Diseminasi Informasi Nasional ." n.d.
- Santosa, Pandji. *Administrasi Publik (teori dan Aplikasi Good Governance)*. Bandung: Refika Aditama., 2008.
- Subarsono, AG. *Analisis Kebijakan Publik (konsep, teori, dan aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Sunggono, Bambang. *Hukum dan Kebijakan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Tachjan. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Lemlit Unpad, 2008.
- Wahab, Solichin Abdul. *Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Edisi 2.* . jakarta: Bumi Aksara., 2002.
- Winarno, Budi. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*,. Yogyakarta: Media Pressindo., 2002.

